RANCANGAN PERUBAHAN RENJA TA. 2022

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dengan segala Rahmat dan Izin-Nya, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 telah selesai disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah berusaha melaksanakan berbagai kegiatan yang telah diprogramkan dalam Rencana Strategis dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misinya.

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah Anggaran Tahun 2022 untuk bahan penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj).

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang dan kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Kuala Tungkal, Juni 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

H.R. GATOT SUWARSO, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631017 199003 1 005

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB.I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB. II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan IV 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM 18

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD . 20

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD 21

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 22

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM 22

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM 25

BAB. V PENUTUP 36

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Unit OPD adalah unit pemberi masukan utama bagi penyusunan dokumen RKPD, RPJMD, bahkan RPJPD. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelengaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan publik.

Pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dan di laksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Pengembangan Kabupaten tidak lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan antara lain Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan itu. Untuk mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Oleh karenanya sebagai konsekuensi logis untuk mewujudkan

kinerja aparatur handal dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas pelayanan yang tepat, mudah, transparan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi dalam lingkungan BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperlukan perencanaan yang benar – benar tepat guna dan terarah.

Dimana perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan pembangunan dengan menetapkan pilihan yang berbasis pada kendala dan mencapai tujuan dalam waktu tertentu. Perencanaan yang baik harus berbasis kepada potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial yang dimiliki suatu daerah. Kemudian untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efesien dan efektif dibidang perencanaan pembangunan daerah diperlukan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 terutama berpedoman kepada Rencana Strategis Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022 untuk bahan penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini di

susun menggunakan pendekatan system management strategi (Strategi Manangement) yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan sebagai Landasan Normatif yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

7. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021
24. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan adalah sebagai pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kepegawaian Derah 1 (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam Proses penyusunan Renja OPD mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika Penulisan dokumen Rencana Kerja Akhir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Kinerja BKPSDM Triwulan II
2.2 Analisis Kinerja PelayananBKPSDM
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

3.4 Program dan Kegiatan

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

BAB. V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2021

Pada Tahun 2021 Program Prioritas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 2 Program antara lain

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan dengan Sumber Dana dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja BKPSDM sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebagaiman tergambar dalam tabel 2.1 berikut:

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH S/D TRIWULAN I TAHUN 2022 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
					Target Renja BKPSDM tahun 2022	Realisasi Renja BKPSDM tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8(7/6)*	*9=(5+7)*	*10=(9/4)*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA								
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKj, LKPJ, LPPK, LPPD dan Evaluasi Kinerja	45	15	15		0	15	0,33
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA, RENJA, RKD dan DPA	36		18		0	0	0,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	36	12	12		0	12	0,33
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	54	18	18		0	18	0,33

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honorarium ASN yang tersedia	36	12	12	3	0,25	15	0,42
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan BMD OPD	3		1		0	0	0,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	203	65	68	68	1	133	0,66
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2		1		0	0	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah								

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Penerangan Kantor	36	12	12	3	0,25	15	0,42
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	36	12	12	3	0,25	15	0,42
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	36	12	12	3	0,25	15	0,42
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	36	12	12	3	0,25	15	0,42
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	36	12	12	3	0,25	15	0,42

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tersedia	36	12	12	3	0,25	15	0,42
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Layanan Surat Menyurat	36	12	12	3	0,25	15	0,42
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Jasa Telepon, Air dan Listrik	36	12	12	3	0,25	15	0,42
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Alat Kebersihan Kantor	36	12	12	3	0,25	15	0,42
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang								

	Urusan Pemerintahan Daerah								
	Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	6	2	2		0	2	0,33
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan/ Operasional	60	20	20		0	20	0,33
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	102	34	34		0	34	0,33
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								

	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya Data/ Informasi Aparatur yang Valid dan Uptodate	36	12	12	3	0,25	15	0,42
	Mutasi dan Promosi ASN								
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang Terseleksi	41	8	20		0	8	0,20
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Usul Kenaikan Pangkat yang di Proses dalam 1 Tahun	1000		500	447	0,89	447	0,45
	Pengembangan Kompetensi ASN								
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat Kapasitasnya	75	71	42	9	0,21	80	1,07

	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	283	223	108	15	0,14	238	0,84
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Perjenjangan	184	164	9		0		
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Pengangkatan , Kenaikan Jabatan, Pembebasan dalam Jabatan Fungsional Tertentu	375	184	150	134	0,89	318	0,85
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								

	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pengangkatan dan Pelantikan PNS dalam Jabatan Struktural dan Mutasi PNS	920	761	100	28	0,28	789	0,86
	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah berkas KARIS/ KARSU/ KARPEG/ Kartu ASN serta Pelayanan Pensiun PNS	1000		500	280	0,56	280	0,28
	Pelayanan Proses izin Perceraian Pegawai	Jumlah Izin Perceraian yang diProses	24		12	3	0,25	3	0,13
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	12	5	5	1	0,2	6	0,50

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 merupakan tahun kedua perencanaan pada renstra BKPSDM tahun 2021-2026. Adapun penyusunan Renja perubahan 2022 yang berdasarkan pada RKPD Perubahan tahun 2022 yang mengacu pada RPJP Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025, yaitu untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang Tanjung Jabung Barat yang maju, berdaya saing, adil dan sejahtera.

Secara umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Capaian kinerja dibidang tersebut dapat digambarkan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dapat merealisasikan 2 (dua) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Adapun fungsi utama yang diharapkan dari instansi ini untuk melaksanakan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang di implementasikan dalam bentuk kegiatan oleh tiap Bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatannya dapat dilihat dari persentase capaian kinerja kegiatan yang biasa didokumentasikan dalam dokumen monitoring, evaluasi kegiatan dan cetak buku.

Pelaksanaan kegiatan di BKPSDM pada tahun 2022 secara umum dapat mencapai target yang di tetapkan sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, yang berarti target dalam renstra hampir semua tercapai atau dengan kata lain dapat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi beban tahun yang bersangkutan. Hal tersebut tercermin dalam tabel 2.1 yang berisi rekapitulasi, evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renja BKPSDM.

Adapun pencapaian target kinerja BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan 2026 adalah sebagaiman tabel 2.2 berikut:

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kode	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah)	IKK	TARGET RENSTRA BKPSDM					REALISASI CAPAIAN					PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Indeks Profesionalitas ASN	77		65	68	71	73%	75%	48,9						
2	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	12%		7.3%	8.2%	9.2%	10.3%	11.6%	8.2						
3	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	12.2%		5.9%	7.1%	8.4%	9.7%	11.2%	9.6						
4	Persentase Penetapan Jabatan sesuai kompetensi	93%		92%	92%	92%	92%	93%	81.5						
5	Rasio Pejabat Fungsional Tertentu	61%		53.9%	55.9%	56.3%	56.7%	56.9%	60.8						
6	Tingkat Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	50%		25%	25%	25%	25%	25%	37.5						

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupkan isu yang cukup mengedepankan dalam pengelolaan administrasi public dewasa ini. Tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah untuk terwujudnya pemerintahan yang baik tersebut, Sesuai dengan tugas pokoknya untuk mendorong penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus berupaya mewujudkan optimalisasi siklus manajemen kepegawaian yang teratur dan terarah dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan mengoptimalkan proses penyelesaian tugas pokok dan fungsi secara berkesinambungan, terinci, terukur serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pendayagunaan aparatur Negara pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintah secara terencana, sistematis, bertahap konfrenship dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur Negara dalam rangka mewujudkan Good Governance, Sejalan dengan kebijakan Regional aparatur Negara di bidang pemerintahan yang secara substansif meliputi langkah dan upaya melalui penataan system kepegawaian, peningkatan pelayanan public serta peningkatan akuntabilitas dan system pengawasan aparatur.

Penyelenggaraan Good Governance dalam pengelolaan administrasi public, dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan Responsibilitas pemerintah, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terhadap tuntutan dan organisasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara, dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang cepat dan jelas dan akuntabel, sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat berlangsung secara efektif dan efesien, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari praktik KKN.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD perubahan adalah salah satu acuan bagi setiap perangkat daearah dalam penyusunan Renja OPD, selain RENSTRA OPD, RKPD disusun dalam rangka sinkronisasi pembanguanan daerah. Oleh karenanya rancangan awal RKPD seyogyanya diketahui secara umum oleh seluruh OPD untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan OPD terkini.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tanjung Jabung Barat kemudian mereview rancangan awal perubahan RKPD yang disandingkan dengan kebutuhan OPD dengan hasil bahwa program dan kegiatan yang terdapat dalam Renja Perubahan BKPSDM Kab. Tanjung Jabung Barat sudah tercantum semua dalam rancangan perubahan RKPD Kab. Tanjung Jabung Barat.

Pada Rencana Kerja Perubahan BKPSDM Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini telah disusun sesuai dengan analisa yang ada dan tentu tidak luput dari pengurangan pergeseran maupun perubahan angka pagu indikatif.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan bersumber dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026.

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berpijak pada kebijakan nasional dalam melaksanakan program dan kegiatan merupakan suatu kesatuan dalam membantu tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan, dimana semua program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan sepenuhnya bisa mendukung program pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja pemerintah, dan merupakan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya alam agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, Nasional dan Global serta tetap berada dalam tatanan System Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

a. Tujuan

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi, adapun tujuan yang akan dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah antara lain:

Kode	Tujuan (T)
T.1	Terwujudnya ASN yang Profesional, Kompeten dan Kompetitif.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu periode renstra. Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Kode	Sasaran (S)
S.1	Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme ASN.
S.2	Meningkatnya Penataan dan Kinerja Aparatur

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKPSDM

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-N					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Terwujudnya ASN yang Profesional, Kompeten dan Kompetitif	Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN	65	68	71	73	75	77
			Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	7.3%	8.2%	9.2%	10.3%	11.6%	12%
		Meningkatnya Penataan dan Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	5.9%	7.1%	8.4%	9.7%	11.2%	12.2%
			Persentase Penetapan Jabatan sesuai Kompetensi	92%	92%	92%	92%	93%	93%
			Rasio Pejabat Fungsional Tertentu	53.9%	55.9%	56.3%	56.7%	56.9%	61%

			Tingkat Penurunan Pelanggaran Disiplin PNS	25%	25%	25%	25%	25%	25%

Indikator Kinerja BKPSDM yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan										
1	Peningkatan Kompetensi Pegawai									
	a. Persentase Pejabat ASN yang Mengikuti Diklat Struktural	%								
	b. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%								
2	Rasio lulusan S1 Dan S2	%								
3	Rasio lulusan Diploma/DIII	%								
4	Rasio lulusan SLTA	%								

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasional yang

harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun impact sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 mempunyai 2 program dan Beberapa Kegiatan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Kepegawaian Daerah
   - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
- Mutasi dan Promosi ASN
- Pengembangan Kompetensi ASN
- Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Untuk menunjang Kegiatan – kegiatan diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun beberapa Sub kegiatan untuk Tahun 2022 yaitu:

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
6. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
7. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
8. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18. Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
20. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
21. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
22. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
23. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

24. Pengelolaan Promosi ASN
25. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
26. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
27. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
28. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
29. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
30. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
31. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
32. Pelayanan Proses izin Perceraian Pegawai
33. Pembinaan Disiplin ASN

MATRIKS
RENCANA KERJA PERUBAHAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022			
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Berkurang/ Bertambah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		**Kab. Tanjab Barat**		**5.901.280.426**	**APBD**			**6.170.202.939**	**268.922.513**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Kab. Tanjab Barat**		**74.731.126**	**APBD**			**74.731.126**	**-**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKj, LKPJ, LPPK, LPPD dan Evaluasi Kinerja	Kab. Tanjab Barat	18 Dokumen	38.033.250	APBD	Jumlah Laporan LKj, LKPJ, LPPK, LPPD dan Evaluasi Kinerja	12 Bulan	38.033.250	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA,	Kab. Tanjab Barat	15 Dokumen	36.697.876	APBD	Jumlah Dokumen RENSTRA,	12 Bulan	36.697.876	-

		RENJA, RKD dan DPA					RENJA, RKD dan DPA			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Kab. Tanjab Barat**		**4.697.881.621**	APBD			**4.697.881.621**	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	4.487.480.121	APBD	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	4.487.480.121	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Kab. Tanjab Barat	18 Dokumen	34.791.500	APBD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	12 Bulan	34.791.500	-
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honorarium ASN yang tersedia	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	175.610.000	APBD	Jumlah Honorarium ASN yang tersedia	12 Bulan	175.610.000	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Kab. Tanjab Barat**		**34.450.000**	**APBD**			**34.450.000**	-
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan BMD OPD	Kab. Tanjab Barat	1 Laporan	34.450.000	APBD	Jumlah Laporan BMD OPD	1 Laporan	34.450.000	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Kab. Tanjab Barat**		**72.085.756**	**APBD**			**72.085.756**	-

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Kab. Tanjab Barat	68 Stel	26.000.000	APBD	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	68 Stel	26.000.000	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tanjab Barat	1 Kali	46.085.756	APBD	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Kali	46.085.756	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Kab. Tanjab Barat**		**563.850.599**	**APBD**			**590.928.891**	**27.078.292**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Penerangan Kantor	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	6.024.565	APBD	Jumlah Penyediaan Komponen Penerangan Kantor	12 Bulan	8.961.920	2.937.355
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	76.277.043	APBD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	12 Bulan	100.417.980	24.140.937
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	7.600.000	APBD	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	12 Bulan	7.600.000	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	37.697.641	APBD	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	12 Bulan	37.697.641	-

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	11.400.000	APBD	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	12 Bulan	11.400.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tersedia	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	424.851.350	APBD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tersedia	12 Bulan	424.851.350	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Kab. Tanjab Barat**		**120.811.324**	**APBD**			**126.233.991**	**5.422.667**
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Layanan Surat Menyurat	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	5.000.000	APBD	Jumlah Layanan Surat Menyurat	12 Bulan	5.000.000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Jasa Telepon, Air dan Listrik	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	58.775.100	APBD	Jumlah Kebutuhan Jasa Telepon, Air dan Listrik	12 Bulan	58.775.100	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Alat Kebersihan Kantor	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	57.036.224	APBD	Jumlah Kebutuhan Alat Kebersihan Kantor	12 Bulan	62.458.891	5.422.667
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Kab. Tanjab Barat**		**337.470.000**	**APBD**			**337.470.000**	-

	Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Kab. Tanjab Barat	2 Unit	140.000.000	APBD	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	2 Unit	140.000.000	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan/ Operasional	Kab. Tanjab Barat	20 Unit	169.440.000	APBD	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan/ Operasional	20 Unit	169.440.000	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Kab. Tanjab Barat	34 Unit	28.030.000	APBD	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34 Unit	28.030.000	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Kab. Tanjab Barat**		-	APBD			**236.421.554**	**236.421.554**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Tanjab Barat			APBD	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	18 Unit	167.979.354	167.979.354
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kab. Tanjab Barat			APBD	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat/ Kendaraan Roda Dua	2 Unit	68.442.200	68.442.200

	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				**2.390.934.891**				**2.991.804.019**	**600.869.128**
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		**Kab. Tanjab Barat**		**21.400.000**	**APBD**			**215.600.000**	**194.200.000**
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya Data/ Informasi Aparatur yang Valid dan Uptodate	Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	21.400.000	APBD	Tersedianya Data/ Informasi Aparatur yang Valid dan Uptodate	12 Bulan	215.600.000	194.200.000
	Mutasi dan Promosi ASN		**Kab. Tanjab Barat**		**314.876.475**	**APBD**			**614.726.475**	**299.850.000**
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang Terseleksi	Kab. Tanjab Barat	20 orang	279.634.275	APBD	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang Terseleksi	71 orang	574.684.275	295.050.000
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Usul Kenaikan Pangkat yang di Proses dalam 1 Tahun	Kab. Tanjab Barat	500 Orang	35.242.200	APBD	Jumlah Usul Kenaikan Pangkat yang di Proses dalam 1 Tahun	500 Orang	40.042.200	4.800.000
	Pengembangan Kompetensi ASN		**Kab. Tanjab Barat**		**1.945.191.945**	**APBD**			**2.001.611.073**	**56.419.128**
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Izin Belajar dan Tugas Belajar yang di Proses	Kab. Tanjab Barat	50 Berkas	703.598.500	APBD	Jumlah Izin Belajar dan Tugas Belajar yang di Proses	50 Berkas	753.598.500	50.000.000

		Jumlah Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS	Kab. Tanjab Barat	2 Orang		APBD	Jumlah Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS	2 Orang		-
		Jumlah peserta Pembekalan Pola Pembibitan Calon Taruna Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)	Kab. Tanjab Barat	40 Orang		APBD	Jumlah Taruna/Taruni STTD yang mendapat bantuan beasiswa	4 Orang		-
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	Kab. Tanjab Barat	108 Orang	987.467.250	APBD	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	80 Orang	966.136.380	(21.330.870)
							Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	70 Orang		
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Perjenjangan	Kab. Tanjab Barat	9 Orang	199.061.500	APBD	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Perjenjangan	8 Orang	199.061.500	-
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Pengangkatan, Kenaikan Jabatan, Pembebasan dalam Jabatan Fungsional Tertentu	Kab. Tanjab Barat	150 Orang	55.064.695	APBD	Jumlah Pengangkatan, Kenaikan Jabatan, Pembebasan dalam Jabatan Fungsional Tertentu	150 Orang	82.814.693	27.749.998

	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		**Kab. Tanjab Barat**		**109.466.471**	**APBD**			**159.866.471**	**50.400.000**
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pengangkatan dan Pelantikan PNS dalam Jabatan Struktural dan Mutasi PNS	Kab. Tanjab Barat	100 Orang	48.818.345	APBD	Jumlah Pengangkatan dan Pelantikan PNS dalam Jabatan Struktural dan Mutasi PNS	100 Orang	99.218.345	50.400.000
	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah berkas KARIS/ KARSU/ KARPEG/ Kartu ASN serta Pelayanan Pensiun PNS	Kab. Tanjab Barat	500 Berkas	19.024.750	APBD	Jumlah berkas KARIS/ KARSU/ KARPEG/ Kartu ASN serta Pelayanan Pensiun PNS	500 Berkas	19.024.750	-
	Pelayanan Proses izin Perceraian Pegawai	Jumlah Izin Perceraian yang diProses	Kab. Tanjab Barat	12 Berkas	18.945.500	APBD	Jumlah Izin Perceraian yang diProses	12 Berkas	18.945.500	-
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Aparatur yang diangkat Sumpah PNS	Kab. Tanjab Barat	163 Orang	22.677.876	APBD	Jumlah Aparatur yang diangkat Sumpah PNS	163 Orang	22.677.876	-
		Jumlah Pelanggaran Disiplin		5 kasus			Jumlah Pelanggaran Disiplin	5 kasus		
					8.292.215.317				**9.162.006.958**	**869.791.641**

BAB V
PENUTUP

Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini merupakan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 s/d 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta target dan sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Adapun kaidah pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan pada UU No. 5 Tahun 2015 tentang aparatur sipil negara, UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang manjemen PNS, Peraturan Presiden No. 12 tahun 1961 tentang pemberian tugas belajar dan Permendagri 85 tahun 2017 tentang pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis sebagai perwujudan kinerja pemerintah yang baik dan akuntabel.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

H.R. GATOT SUWARSO, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631017 199003 1 005